



DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIAMIS



RENCANA KERJA

TAHUN 2023



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun Anggaran 2023.

Dengan tersusunya Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ini dapat dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan yang merupakan media penilaian Rencana Strategis yang perlu dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja (RKT) Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023.

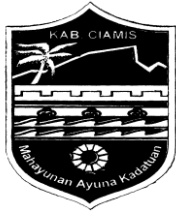
Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya mengalami berbagai hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunya Rencana Kinerja (RKT) ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.

Ciamis, September 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIAMIS**

  
**HENDRA SUHENDRA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690429 199403 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS SOSIAL**  
Jalan Tentara Pelajar Nomor 1-3 Telepon (0265) 771096  
**CIAMIS**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

NOMOR : 050/Kpts. .... - Dinsos/2022

TENTANG :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan terlaksananya Pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan Tahun 2023;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu segera menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk 1 (satu) tahun di Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2021 dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
17. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900/Kpts.3Huk/2020 tentang pelimpahan sebagian kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada para kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, terdiri dari :  
a. Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2023;  
b. Program Yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial untuk Tahun 2019-2024;  
c. Kegiatan yang merupakan tindakan dalam memanfaatkan Sumber Daya yang ada sesuai dengan kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial 2019-2024, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2023;  
d. Penentuan Indikator Kinerja Kegiatan yang terukur secara kuantitatif atau kualitatif, dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam satu tahun dari Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 16 September 2020

Ciamis, September 2022



**HENDRA SUHENDRA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690429 199403 1 003

## DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	1
<b>SK RENJA TAHUN 2023</b>	2
<b>DAFTAR ISI</b>	5
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SKPD TAHUN LALU</b>	11
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2021	11
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021	18
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis	18
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	24
2.5. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis	37
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	38
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN</b>	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	40
3.3 Program dan kegiatan	41
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	47

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan dalam ketentuan umum bahwa, Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 sebagai bentuk

komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat pula Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, bertujuan untuk menguraikan program dan kegiatan Dinas Sosial secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun.

Sejalan dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004, Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja serta dengan adanya komitmen bersama, akan tercipta suatu kesepahaman, kesepakatan, dalam pelaksanaan tugas dengan tujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal, diharapkan pula dapat menciptakan masyarakat yang produktif hingga dapat menciptakan usaha baru sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Sosial dalam Penyusunan Rencana Kinerja ini mempunyai harapan yang hendak dicapai dan mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Efektivitas kegiatan dapat ditingkatkan dengan sistem penyusunan perencanaan yang baik dan berhati-hati agar tidak terjadi pemborosan dan kerugian bagi Negara oleh karena itu monitoring pelaksanaan kegiatan dan pengawasan internal sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2022 Tentang RKPDP Kabupaten Ciamis Tahun 2021;

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini adalah sebagai dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang menguraikan berbagai Program dan kegiatan Dinas Sosial secara sistematis mulai dari sasaran, pembiayaan, indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun.

Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2023 merupakan dasar untuk penentuan pembuatan KUA-PPAS yang dilanjutkan untuk penentuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DPA-SKPD.

## 1.4 Sistematikan Penulisan

SK Tim Penyusun

Perbup tentang Renja PD

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 DAN REALISASI RENSTRA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2021

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran - Hasil Penetapan Permendagri 90

- Penyesuaian Cascading Renstra

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**  
**TAHUN 2021 DAN REALISASI RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

**2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis pada Tahun 2021 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2021. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2021, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, dalam rangka mendukung upaya pencapaian dari misi 1 meningkatkan kualitas SDM, dengan sasaran 1 Menurunkan tingkat kemiskinan dan Sasaran 3 Menurunkan PMKS dari tujuan 7 meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, Maka program/kegiatan pembangunan bidang sosial dapat disajikan pada Tabel 2.1 dibawah ini.



**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PENCAPAIAN**  
**RENSTRA S/D TAHUN 2021**

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun 2021(n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
						Target Renja OPD tahun 2019 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2019 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	<b>URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL</b>											
1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
2	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah</b>	Persentase PSKS yang dikembangkan		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang/bulan	28	-	-	-	-	7 bulan	7 bulan	-	-

4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	45	-	-	-	-	35 lembaga	35 lembaga	-	-
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang/bulan	8	-	-	-	-	8 bulan	8 bulan	-	-
6	<b>REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi (SPM)</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
7	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
8	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang/bulan	30	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	-	-
9	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	-	-	-	-	20 orang	20 orang	-	-

10	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	20	-	-	-	-	16 orang	16 orang	-	-
11	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	40	-	-	-	-	15 orang	15 orang	-	-
12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	-	-	-	-	-	40 rang	40 rang	-	-
13	<b>PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
14		<b>Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
15		<b>Persentase validitas data fakir miskin</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
16	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasus	-	-	-	-	-	10 kasus	10 kasus	-	-
17	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase data fakir miskin yang terkelola</b>			-	-	-	-			-	-
18	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	kecamatan	27 / 397.769	-	-	-	-	27 kecamatan	27 kecamatan	-	-
19	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	KPM	46.228	-	-	-	-	126.795 KPM	126.795 KPM	-	-

20	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	KK	350	-	-	-	-	213 KK	213 KK	-	-
21	<b>PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
22	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	<b>Persentase desa rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
23	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang/Paket	67	-	-	-	-	50 orangg/650 paket	50 orangg/600 paket	-	-
24	<b>PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
25		<b>Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-
26	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.</b>		100 %	-	-	-	-	100 %		-	-

27	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan	orang	-	-	-	-	-	9 orang/230 makam	9 orang/230 makam	-	-
----	---	--	-------	---	---	---	---	---	-------------------	-------------------	---	---

## **2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021**

Tabel Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 (table terlampir)

## **2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, Kepala Dinas Sosial membuat perjanjian kinerja dengan Bupati untuk masa satu tahun yang memuat sasaran strategis, dan indikator kinerja terkait dengan tugas dan fungsi.

Pada Perjanjian kinerja Tahun 2021 terdapat 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 indikator sasaran untuk level eselon II termasuk didalamnya kegiatan Non Urusan. Sedangkan pada level eselon III dan IV jumlah indikatornya semakin bertambah sesuai dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, selengkapnya sebagaimana tabel halaman berikut.

**DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>		<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2021</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>		<b>3.</b>	<b>4.</b>
1	Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.30 point
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	1	Level Maturitas SPIP	4
		2	Hasil Evaluasi AKIP	B
		3	Kualitas Pelaporan Keuangan SOPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	650 point
3	Meningkatnya kesejahteraan PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)	1	Persentase (%) PPKS yang tertangani	100%
4	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS	1	Prosentase (%) PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penanganan PPKS	100%

	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.730.489.577	APBD Kabupaten
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.113.778.500	APBD Kabupaten
III	Program Rehabilitasi Sosial	428.949.700	APBD Kabupaten
IV	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.188.599.500	APBD Kabupaten
V	Program Penanganan Bencana	731.690.000	APBD Kabupaten
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	39.902.500	APBD Kabupaten
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.233.409.777</b>	

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2021, Dinas Sosial mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Ciamis sebesar Rp. **10.233.409.777,-** yang digunakan untuk melaksanakan 32 Sub Kegiatan, 13 kegiatan yang terangkum dalam 6 program sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Program yang dilaksanakan Tahun 2021**

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	3.730.409.777
2.	Program Pemberdayaan Sosial	1.113.778.500
3.	Program Rehabilitasi Sosial	428.949.700
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.188599.500
5.	Program Penanganan Bencana	731.690.000
6.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	39.902.500
	<b>Jumlah</b>	<b>10.233.409.777</b>

*Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2021*

Dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021, selengkapnyanya sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**  
**Sasaran Strategis PK Dinas Sosial Tahun 2021**

No.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Non Urusan)	3.730.489.577
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah (Non Urusan)	
3.	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat miskin dan kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	5.389.141.700
4.	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS/PPKS	1.113778..500
	<b>Jumlah</b>	<b>10.233.409.777</b>

*Sumber : Dokumen PK Dinas Sosial Tahun 2021*

Ke-4 sasaran strategis tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2019-2024 sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis guna menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DPA SKPD), Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja (LKIP) sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Selanjutnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2021 yang telah direvisi sebagaimana tertuang pada tabel halaman berikut :

**Tabel 2.3**  
**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah penduduk miskin dan PPKS yang tertangani	orang	n/a	144.361	173.143	164.185	155.126	146.248	137.310	137.310
2.	Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	%	n/a	101	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	99,94	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	31	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	72	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	78	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	14	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8.	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
9.	Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100
10.	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Yayasan/Panti	73	63	71	75	80	85	90	90
11.	Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	B	B	BB	BB	A	A	A	A
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	n/a	80,75	83.17	83.67	84.17	84.67	85.17	85.17
13.	Maturitas SPI	Level (Angka)	3	3	4	4	4.5	5	5	5
14.	Kualitas Pelaporan Keuangan SOPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Angka	490	655	700	750	800	850	900	900

Berdasarkan tabel tersebut di atas, program kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 harus pula mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permensos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mulai di berlakukan pada Bulan Januari 2019 sehingga didalam Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial perlu diselaraskan agar seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap sinergis.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 dinyatakan “berhasil” dari target yang telah ditetapkan, selengkapny sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1.	Meningkatnya Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.17 point	90.00	A	sangat Memuaskan
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah	Level Maturitas SPIP	4	3	3	
		Hasil Evaluasi AKIP	B	BB	70,62	
		Kualitas Pelaporan Keuangan SOPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	700 point	.....	.....	Proses penilaian belum selesai
3.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dan PPKS	Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	100 %	95,53 %	95,53 %	
		Prosentase PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang	100 %	95,63 %	95,63 %	

		memperoleh bantuan sosial				
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	64,26 %	67,23 %	
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	98,73%	98,58 %	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	48,83%	47,57 %	
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	100%	100%	
4.	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS/PPKS	100 %	99 %	99 %	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan daarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM baru)	100 %	100 %	100 %	

*Sumber : Dokumen PK Dinas Sosial Tahun 2021*

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa capaian terrendah dari indikator PK Tahun 2021 dari dari indikator Persentase lanjut Usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) dengan capaian sebesar 47,57 %, hal ini karena jumlah usulan penerima bantuan tidak bisa terealisasi seluruhnya dari sumber dana APBN hal ini masih terkendala covid-19.

Untuk capaian persentase tertinggi yaitu penanganan orang terlantar di perjalanan dan penanganan korban bencana Alam dan social sebesar 100% hal ini setiap laporan dapat ditangani seluruhnya.

## B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

### 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, diketahui bahwa realisasi kinerja Tahun 2021 dari indikator PK Eselon II, ada beberapa perubahan indikator yang disesuaikan dengan Indikator dalam Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Kementerian Sosial RI melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2019. Adapun yang mengalami perubahan adalah indikator ; Persentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani dengan Target capaian 100 % dan realisasinya mencapai 94,41% ketika tahun 2020 mencapai diatas 100% hal ini ketika pandemi covid-19 bantuan yang turun adalah bentuk bantuan social berupa sembako yang turun dari berbagai pihak seperti kementerian social, Provinsi dan APBD sedangkan untuk Tahun 2021 bantuan dari APBD dan APBN berupa program BPNT, PKH dan Atensi.

### 2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021

Sebagai tolak ukur untuk melihat capaian kinerja Tahun 2021 maka perlu disandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020, selengkapnya sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini ;

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

No	INDIKATOR	2020		2021	
		Target	Realisasasi	Target	Realisasi
1.	Persentase (%) PMKS yang mandiri atau berubah perilaku (IKU)	100 %	37.48 %	-	-
2.	Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	100%	126,66%	100%	94,41%
3.	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	32,37 %	100 %	67,23%
4.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %	52,08 %	100 %	98,58%

	di luar panti (SPM)				
5.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	111 %	100 %	47,57%
6.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	86,85 %	100 %	100 %
7.	Prosentase (%) korban bencana skala Kabupaten Ciamis yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Prosentase (%) PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS/PPKS	100 %	97 %	100 %	99,63%

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Persentase (%) PMKS yang mandiri atau berubah perilaku pada tahun 2020 masih merupakan indikator dalam PK Dinas Sosial dan pada Tahun 2021 dengan adanya perubahan sasaran Renstra maka indikatornya tidak lagi digunakan dan diganti dengan indikator baru yaitu “Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani” dari target yang ditetapkan sebesar 100% terrealisasi sebesar 94,41 %, artinya tidak semua Penduduk Miskin dan PPKS yang diusulkan untuk penanganan social terealisasi sesuai target hal ini hal ini jumlah usulan tidak sebanding dengan jumlah kuota penanganan, sehingga yang tidak tertangani pada tahun 2021 diusulkan kembali pada tahun 2022.

Capaian indikator yang masih dibawah 50% adalah dari indikator Persentase lansia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) dengan capaian sebesar 47,57%. Apabila dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 menunjukkan penurunan yang sangat besar hal ini karena pada tahun 2020 bantuan social berupa sembako covid-19 sangat membantu kenaikan capaian penanganan sedangkan tahun 2021 hanya berdasarkan bantuan APBD dan program Atensi dari APBN namun demikian dari target yang ditetapkan dalam SPM masih sangat jauh capaiannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah memasukan para

jompo dalam Program PKH sangat membantu dalam penanganan Lasiia Terlantar.

Capaian yang masih kurang dari 100% adalah pada indikator Persentase Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM) sebesar 67,23% apabila di bandingkan dengan tahun 2020 ada kenaikan capaian sedangkan untuk lanjut usia terlantar dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami penurunan capaian. Capaian untuk Anak terlantar Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sehingga kegiatan pelatihan untuk anak terlantar yang biasanya dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dapat dilaksanakan 4 kali.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

Didalam target RPJMD Periode 2019 – 2024 ditetapkan target capaian sebagaimana tertuang didalam PK Dinas Sosial sebagaimana tabel halaman berikut ini ;

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target Renstra dan RPJMD Periode 2019-2024**

No	Indikator	Realisasi Kinerja 2021	Target Renstra	Target RPJMD	Ket.
1.	Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	95,53%	100 %	100 %	
2.	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	64,26 %	100 %	100 %	
3.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	98,73 %	100 %	100 %	
4.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	48,83 %	100%	100 %	
5.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	100%	100 %	
6.	Prosentase (%) korban bencana skala Kabupaten Ciamis yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100 %	100 %	100 %	
7.	Prosentase (%) PSKS yang	99 %	100 %	100 %	

	berpartisipasi dalam penanganan PMKS				
--	--------------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2021 apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Sosial, ada 5 indikator yang tidak memenuhi target hingga 100% dan 2 indikator yang mencapai target 100%. Permasalahannya hampir sama, yakni adanya prioritas anggaran yang lebih difokuskan pada penanganan pandemi Covid 19 sehingga kegiatan yang sifatnya mendukung SPM pun harus dialihkan.

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Standar nasional yang dijadikan perbandingan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Bidang Sosial sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pusat dan daerah atau menjadi urusan konkuren.

Untuk perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 berdasarkan pada indikator SPM Baru sesuai Permensos No 9 Tahun 2018, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemberlakuan SPM Baru mulai 1 Januari 2019. Oleh karena itu indikator yang digunakan adalah indikator baru, selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dengan Target SPM**

No.	INDIKATOR	Tahun 2021	
		SPM	Realisasi
1.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	67,23 %
2.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	47,57 %
3.	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	98,58 %
4.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
5.	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa persentase capaian terendah dari indikator Persentase (%) Lanjut USia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 47,57 %, persentase terendah kedua dari indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 67,23 % sedangkan untuk anak terlantar mencapai hampir memenuhi target hal ini karena didukung dengan adanya Program PKH. Ketidaktercapaian kedua indikator tersebut dikarenakan adanya prioritas anggaran yang lebih dipusatkan pada penanganan pandemi covid 19 sehingga dengan sendirinya realisasi capaian kinerjapun menurun. Indikator yang mencapai target ada 2 (dua) indikator yaitu Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, dan Persentase (%) Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diutamakan bagi orang terlantar di perjalanan.

**5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan;**

**1) Faktor Pendukung Keberhasilan/Peningkatan ;**

- a. Dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan Pusat untuk program penanggulangan kemiskinan dan penanganan pandemi Covid 19 Tahun 2021 masih besar dan dirasakan masyarakat sangat terbantu walaupun masih banyak pula yang belum terjangkau atau tertangani.
- b. Dalam penanganan masalah sosial terbentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani berbagai permasalahan telah banyak membantu dalam penanganan masalah sosial terutama yang sifatnya lintas kabupaten/kota dan provinsi.
- c. Meningkatnya jumlah Penerima Bantuan Sosial Sembako dari Kementerian Sosial RI dari 135.286 KPM pada tahun 2020 menjadi 192.062 KPM pada tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari perluasan dalam rangka pengamanan jejaring sosial dampak pandemi Covid-19;

- d. Bantuan logistik bencana dari pusat baik bantuan PSKBA maupun PSKBS sangat membantu dalam penyediaan logistik bencana untuk wilayah Kabupaten Ciamis.
- e. SDM Mitra Dinas Sosial seperti Pendamping PKH, TKSK, Pendamping Rehsos dan TKS sebagai pendamping dalam penyaluran Paket Sembako, TAGANA dalam penanganan berbagai bencana.

**2) Faktor Penghambat / Kegagalan / Penurunan ;**

- a. Tidak tercapainya target 3 indikator SPM Tahun 2021 salah satunya adalah karena adanya focus anggaran yang lebih diprioritaskan pada penanganan pandemi covid 19 ;
- b. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menggunakan teknologi/aplikasi/jejaring komunikasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi;
- c. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat dalam pengelolaan DTKS terutama dengan masih ditemukannya penduduk miskin yang belum terakomodir oleh program pemerintah, sementara yang kondisi sosial ekonominya telah mapan tetap mendapatkan bantuan sosial.

**3) Alternatif / Solusi Yang Telah Dilakukan**

- 1. Untuk meningkatkan capaian indikator terutama indikator SPM Sosial, maka perlu dilakukan penyesuaian indikator capaian, sebagai contoh, kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang proses pelaksanaannya sudah sampai tahap seleksi, maka indikatornya disesuaikan mengingat kegiatan sudah memasuki tahapan tinggal pelaksanaan.
- 2. Pengiriman pegawai dalam mengikuti berbagai pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian Sosial dalam upaya peningkatan profesionalisme pegawai terutama bagi pegawai yang tidak memiliki latar belakang profesi pekerjaan sosial sedikit banyak harus faham tentang permasalahan sosial
- 3. Verifikasi dan validasi terus dilakukan mulai dari tingkat Desa maupun kelurahan.

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ;

Melihat pagu anggaran Dinas Sosial Tahun 2021 sebesar Rp. **10.233.409.777,-** apabila dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp. 4.695.666.004,- maka mengalami kenaikan sebanyak Rp. 5.537.743.773,- atau sebesar 45,89 %, namun demikian capaian kinerja tetap belum sesuai target hal ini karena pandemic covid-19 sehingga jumlah PPKS pun bertambah maka yang perlu mendapatkan penanganan pun bertambah.

Dukungan yang masih dirasakan belum optimal antara lain:

- a) Bantuan untuk pengembangan usaha berupa KUBE untuk KPM PKH yang sudah graduasi mandiri atau keluar dari keanggotaan baik karena tidak ada komponen maupun yang sudah mandiri khususnya dari sumber dana APBD Kabupaten belum terlaksana;
- b) Bantuan untuk Anak Terlantar berupa Usaha Ekonomis Produktif (UEP) yang telah mengikuti pelatihan keterampilan belum terlaksana ;
- c) Proses Verifikasi dan validasi DTKS di tingkat desa/kelurahan belum optimal sehingga masih ada ditemukan keluarga yang seharusnya sudah tidak mendapatkan bantuan sosial ternyata masih mendapatkan bantuan sosial, sehingga hal ini menimbulkan kecemburuan sosial.

## 7. Hambatan/Kendala Yang Dihadapi

Secara garis besar seluruh Program dan kegiatan pada Tahun 2021 terutama yang bersifat teknis bisa diselesaikan dan dilaksanakan sesuai perencanaan, namun masih ada Hambatan/Kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Masih adanya kegiatan yang tidak bisa diserap 100% khususnya untuk non urusan berasal dari belanja telepon, air dan internet serta kelebihan dari belanja modal.
- 2) Untuk kegiatan Validasi dan Verifikasi DTKS ada sisa lebih honor yang tidak terserap dikarenakan ada dobel honorer bagi Non PNS penerima sehingga hanya salah satu yang diterima dan sisanya dikembalikan ke kas daerah;

- 3) Kegiatan pengelolaan Data Fakir Miskin, pengembalian dana sembako kemiskinan untuk terdampak covid-19 karena apabila direalisasikan akan mendatangkan kecemburuan social;
- 4) Adanya pandemi covid 19 telah merubah model pembelajaran bagi masyarakat dari biasanya melalui tatap muka menjadi on line, oleh sebab itu mekanise pembinaanpun berubah menjadi *home visit*, sehingga memerlukan waktu dan biaya yang cukup.

### C. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis Tahun 2021, dari pagu anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 9.634.388.217,- atau 94,15 %. Selengkapnya sebagaimana tertera pada tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2021**

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan daerah Kabupaten/Kota	3.730.489.577	3.623.397.717	97,13
2.	Program Pemberdayaan Sosial	1.113.778.500	1.111.176.000	99,77
3.	Program Rehabilitasi Sosial	428.949.700	427.949.000	99,77
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.188.599.500	3.929.471.500	93,81
5.	Proram Penanganan Bencana	731.690.000	502.491.500	68,68
6.	Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan	39.902.500	39.902.500	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.233.409.777</b>	<b>9.634.388.217</b>	<b>94,15</b>

*Sumber Data: RKA Dinas Sosial Tahun 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari aspek penggunaan anggaran Tahun 2021 dengan capaian sebesar 94,15 %, atau secara pengelolaan anggaran mengalami penurunan dibanding Tahun 2020 yang capainya sebesar 99,66 %. Hal ini ada anggaran untuk penanganan covid-19 yang tidak terserap seluruhnya. Ada 1 (satu) program yang capainya 100% dan 5 (lima) program dibawah angka 100%. Realisasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi kinerja capainya sedikit lebih tinggi dari realisasi kinerja, karena realisasi kinerja tahun ini mengalami peningkatan menjadi 99,85 % dibandingkan dengan Tahun 2019 dengan capaian sebesar

97,87 %, peningkatan ini berasal dari meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat bantuan sosial akibat terdampak Covid 19, Selengkapnya sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Non Urusan)	97,26 %	97,75 %	98,69 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah (Non Urusan)	97,00 %	100 %	98,5 %
3.	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	88,53 %	89,25 %	90,4 %
4.	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masyarakat miskin dan PPKS	99,77 %	100 %	99,89 %
	<b>Jumlah Total</b>	<b>94,15 %</b>	<b>93,50 %</b>	<b>93,83 %</b>

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Ciamis Tahun 2016 S/D Tahun 2020**

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2017 (thn n-2)	Tahun 2018 (thn n-1)	Tahun 2019 (thn n)	Tahun 2020 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase (%) PMKS skala Kabupaten Ciamis yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (SPM)	100 %	-	80 %	80 %	100%	100%	91.58	99.97	100	100	
	Persentase (%) PMKS skala Kabupaten Ciamis yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM)	100 %	-	80 %	80 %	100%	100%	98.66	48.58	100	100	
	Persentase (%) panti sosial skala Kabupaten Ciamis yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)	100 %	-	80 %	80 %	100%	100%	98.36	116	100	100	
	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten Ciamis yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (SPM)	100 %	-	60 %	60 %	100%	100%	100	197	100	100	

Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten Ciamis yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100 %	-	80 %	80 %	100%	100%	90	80	100	100	
Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik dan Mental serta Lanjut Usia Tidak Potensial yang telah menerima jaminan sosial (SPM)	100 %	-	80 %	80 %	100%	100%	75.86	91	100	100	
Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (SPM)	100 %	-	40 %	40 %	100%	100%	38	100	100	100	
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	-	61 Panti	61 Panti	61 Panti	61 Panti	61 Panti	61 Panti	71 Panti	71 Panti	71 Panti	
PMKS yang memperoleh bantuan sosial	-	100 %	100%	100%	100%	100%	91.67	99.94	100	100	

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa ada 3 (tiga) indikator yang menunjukkan kenaikan diatas 100 % yaitu tentang Jumlah Pantti yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, penanganan korban bencana dan persertase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dengan asumsi dilihat dari jumlah kelompok BKMM ditiap desa sebanyak 1 (satu) kelompok maka dikategorikan 100 %, karena kelompok pengajian ini selain bergerak dibidang keagaam juga melaksanakan fungsi sosial kemasyarakatan.

Sedangkan indikator yang capaiannya kurang dari 100% bahkan tidak sampai 50% adalah dari indikator Persentase (%) PMKS skala Kabupaten Ciamis yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya (SPM) yang hanya mencapai 48.58% atau sebanyak 770 orang dari target RPJM sebanyak 1.585 orang. Hal ini di karenakan luncuran program pemberdayaan dalam bentuk bantuan KUBE hanya 77 kelompok dengan sumber dana APBD I dan APBN.

## 2.5 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sebagai berikut : “ *Penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* “. Isu tersebut ada sedikit perubahan berkenaan dengan adanya perubahan SOTK Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja menjadi dinas tersendiri, sehingga isu strategisnya berubah dan memunculkan pada upaya “ *penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)* : sebagai sasaran pokok dan utama dari Dinas Sosial.

Adapun permasalahan-permasalahan pada Dinas Sosial tersebut masih merupakan isu terkait dengan bidang sosial meliputi :

1. Prosentase KK miskin masih cukup tinggi;

2. Gelandangan, pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada;
3. Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
4. Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
5. Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
6. Jumlah Bantuan PMKS masih terbatas.

## **2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat**

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat terangkum dalam Daftar Prioritas Program dan Kegiatan Daerah sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui mekanisme tahapan sesuai Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berbagai usulan dari tingkat bawah tidak seluruhnya dapat diakomodir sehubungan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya:

1. Program/kegiatan tersebut tidak masuk dalam bidang tugas Dinas Sosial;
2. Nomenklatur program/kegiatan tidak sesuai tidak terdapat pada Program dan kegiatan Dinas Sosial;
3. Alokasi anggaran terbatas sehingga harus ditentukan berdasarkan prioritas;
4. Jumlah sasaran penanganan yang kompleks dan luas sehingga perlu prioritas;
5. Proses penginputan usulan program kegiatan salah penempatan.

## BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- Menyempurnakan program perlindungan sosial
- Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
- Pemberdayaan masyarakat, dan
- Pembangunan yang inklusif

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan empat klaster, masing-masing :

- Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga
- Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
- Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Dinas Sosial sebagai SKPD teknis memiliki sasaran garapan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan 26 permasalahan sosialnya, dan salah satu indikatornya adalah penanganan fakir miskin.

Kebijakan Pemerintah sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin lebih mempertegas tugas dan fungsi Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah yang ditunjuk secara langsung sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan dengan jumlah anggaran sebesar 52 Triliun yang diperuntukan pada

penanggulangan kemiskinan dengan basis 1 (satu) pintu, diantaranya melalui Program PKH dan Rastra (Beras Sejahtera).

Kebijakan Pemerintah Daerah khususnya dalam upaya program Penanggulangan Kemiskinan dimana dalam salah satu Program Pusat yaitu PKH mengharuskan adanya *sharing* minimal 5% dari daerah, terrealisasi sebesar Rp. 249.750.000,- berupa Dana operasional PKH, sedangkan subsidi daerah untuk pendampingan Bantuan Raskin/Rastra tidak lagi diberikan, karena bentuk bantuan berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

### 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Terkait dengan kebijakan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait dengan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pada periode 5 (lima) tahun ke depan adalah “*Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan*”. Selanjutnya secara spesifik diprioritaskan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin dengan meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
2. Pembangunan kesejahteraan sosial diprioritaskan pada pengembangan kemandirian melalui peningkatan keterampilan dan penguatan akses bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) dalam memanfaatkan sistim sumber;
3. Dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS, diprioritaskan pada penanganan luar panti sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Sasaran Renja Tahun 2023 merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai tahun I (pertama) periode RPJMD 2019-2024.

Penetapan ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi, oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat miskin dan PPKS (pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Indikator kinerja : Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani

2. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan masyarakat miskin dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Indikator kinerja : Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial

### **3.3. Program Dan Kegiatan**

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Baru yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2021 dengan total anggaran murni sebesar Rp. 13,286,105,750,- yang akan dilaksanakan melalui Program, Kegiatan dan Sub kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( 7 kegiatan 30 Sub kegiatan );
2. Program Pemberdayaan Sosial ( 1 kegiatan 4 sub kegiatan );
3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ( 1 kegiatan 1 sub kegiatan );
4. Program Rehabilitasi Sosial ( 2 kegiatan 15 sub kegiatan )
5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ( 2 kegiatan 5 sub kegiatan )
6. Program Penanganan Bencana ( 2 kegiatan 5 sub kegiatan )

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut memiliki sasaran indikator kinerja dan target sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

## A. Urusan Dan Non Urusan

Tabel 3.1

### SASARAN , INDIKATOR KINERJA DAN TARGET DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target 2023
1	2	3	4
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		
1. Hasil Evaluasi AKIP			
2. Kualitas Pelaporan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		BB Predikat 650 Nilai
3. Indeks Kepuasan Masyarakat			82,93 Nilai
4. Level Maturitas SPIP			3 Nilai
Terfasilitasinya Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang difasilitasi	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan

<b>Persentase penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bul
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan
<b>Terfasilitasinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>
<b>Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>100%</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan
<b>Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan
<b>Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100%</b>

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit
<b>Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100 100</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
<b>Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan PD</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
<b>1. Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>100%</b>
<b>2. Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial</b>			<b>100%</b>
<b>Persentase PSKS yang dikembangkan</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	120 orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	28 Orang
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Lembaga
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	8 sertifikat
<b>1. Persentase warga negara migran yang</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA</b>		<b>100%</b>

terselesaikan dalam penyelesaian kasusnya	<b>NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>		
Persentase warga negara migran yang terfasilitasi dalam penanganan pemulangannya	<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</b>		<b>100%</b>
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang
<b>1. Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>100%</b>
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>		<b>100%</b>
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan	25 Orang

		Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
<b>Persentase PPKS lainnya diluar Panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>		<b>100%</b>
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang
<b>1. Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial (TPB 1)</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>		<b>100%</b>
<b>2. Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial</b>			<b>100%</b>
<b>3. Persentase validitas data fakir miskin</b>			<b>100%</b>
<b>Persentase anak terlantar yang tertangani</b>	<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>		<b>100%</b>
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang
<b>Persentase data fakir miskin yang terkelola</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>100%</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	397769 Orang
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	46228 KPM
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan	10 orang

		Kabupaten/Kota	
1. Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		100%
Persentase korban bencana alam yang tertangani	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>		100%
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	750 orang
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	20 orang
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 unit
Persentase masyarakat yang meningkat kapasitas kesiapsiagaannya	<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>		100%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	67 Orang

## B. Bantuan Sosial Keuangan

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Rumah Tidak Layak Huni	6,124,075,000,-
2	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	66,300,000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.190.375.000,-</b>

## C. Bantuan Hibah

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bantuan Hibah Kepada Panti/Yayasan dan Karang Taruna	607,957,500,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>607,957,500,-</b>

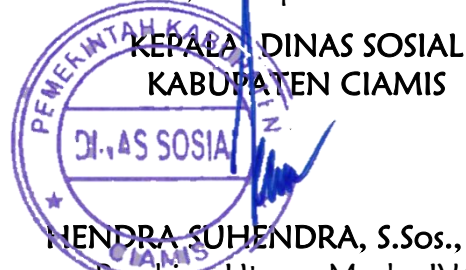
## BAB IV PENUTUP

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagai komitmen Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Ciamis, September 2023



**HENDRA SUHENDRA, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19690429 199403 1 003

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Nasional				
1														
1	06								13,286,105,750					
1	06	01							4,153,412,750					
1	06	01	2.01						85,730,000					
1	06	01	2.01	01					1 Dokumen	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe Publik Inova
1	06	01	2.01	02					1 Dokumen	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe Publik Inova
1	06	01	2.01	03					1 Dokumen	2,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe Publik Inova
1	06	01	2.01	04					1 Dokumen	2,620,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe



**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
														Nasional	
1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	2,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan P Publik Inova
1	06	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	13,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan P Publik Inova
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	26,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan P Publik Inova
1	06	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	<b>238,461,000</b>				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	9,665,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan P Publik Inova
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan P Publik Inova
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				10 Paket	10,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan P Publik Inova
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetakan dan				12 Paket	22,606,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan P Publik Inova

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
														Nasional	
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	463,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe Publik Inova
1	06	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 100		100 100	100 100	<b>94,501,750</b>				
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	3,660,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe Publik Inova
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	41,941,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe Publik Inova
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	48,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe Publik Inova
1	06	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan PD	100 %		100 %	100 %	<b>276,850,000</b>				
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				24 Unit	218,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.Peni Kelola dan Pe Publik Inova

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
														Nasional	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				120 orang	130,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Orang	2,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Lembaga	607,957,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				8 sertifikat	54,812,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	03			<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>	1. Persentase warga negara migran yang terselesaikan dalam penyelesaian kasusnya	100 %		n/a %	100 %	5,005,000				
1	06	03	2.01		<b>Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah</b>	Persentase warga negara migran yang terfasilitasi dalam	100 %		0 %	100 %	5,005,000				

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
														Nasional	
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %		100 %	100 %	352,904,000				
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	109,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	57,919,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
														Nasional	
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	14,815,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	13,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	10,755,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	12,835,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	04	2.02		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Persentase PPKS lainnya diluar Panti yang mendapatkan rehabilitasi sosial	100 %		100 %	100 %	72,237,000				
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	10,005,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan 3. Per Kemis Perline dan P Lapan

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	
														Nasional	
1	06	04	2.02	06	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	10,430,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	05			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	1. Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial (TPB 1) 2. Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial 3. Persentase validitas data fakir miskin	100 % 100 % 100 %		86 % 78,39 % 85 %	100 % 100 % 100 %	7,438,057,500				
1	06	05	2.01		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	Persentase anak terlantar yang tertangani	100 %		100 %	100 %	14,595,000				
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	14,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	05	2.02		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase data fakir miskin yang terkelola	100 %		100 %	100 %	7,423,462,500				
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				397769 Oran	323,687,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Per Kemis Perline dan P Lapan
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan				46228	909,400,000		Dana Transfer Umum-Dana		3. Per Kemis P

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas
														Nasional
1	06	06			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	1. Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100 %		100 %	100 %	468,260,000			
1	06	06	2.01		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Persentase korban bencana alam yang tertangani	100 %		100 %	100 %	55,035,000			
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				750 orang	11,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				20 orang	2,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				1 unit	40,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
1	06	06	2.02		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana</b>	Persentase masyarakat yang meningkat kapasitas kesiapsiagaannya	100 %		100 %	100 %	413,225,000			

